

**EVALUASI PENYALURAN PROGRAM ANGGARAN DANA
DESA DI DESA PAMAH KECAMATAN TANAH PINEM
KABUPATEN DAIRI**

SKRIPSI

OLEH:

SINDI DEA AGUSTINA GINTING

178520077



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21

**EVALUASI PENYALURAN PROGRAM ANGGARAN DANA DESA DI
DESA PAMAH KECAMATAN TANAH PINAM KABUPATEN DAIRI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area**



OLEH :

**SINDI DEA AGUSTINA GINTING
178520077**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Evaluasi Penyaluran Program Anggaran Dana Desa Di
Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

Nama Mahasiswa : Sindi Dea Agustina Ginting

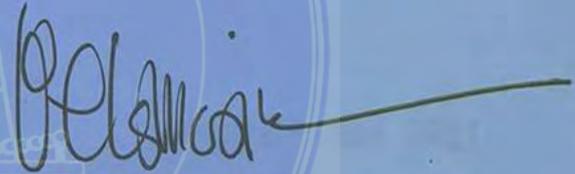
NPM : 178520077

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Agung Suharyanto, S.Sn M.Si

Beby Masitho Batubara, S.Sos. M.AP

Mengetahui :

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik



Dr. Heri Kusmanto, MA



Nina Angelina, S.Sos, M.Si

Tanggal Lulus: 02 Juni 2021

Document Accepted 28/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh sewaktu-waktu dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 02 Juni 2021



Sindi Dea Agustina Ginting

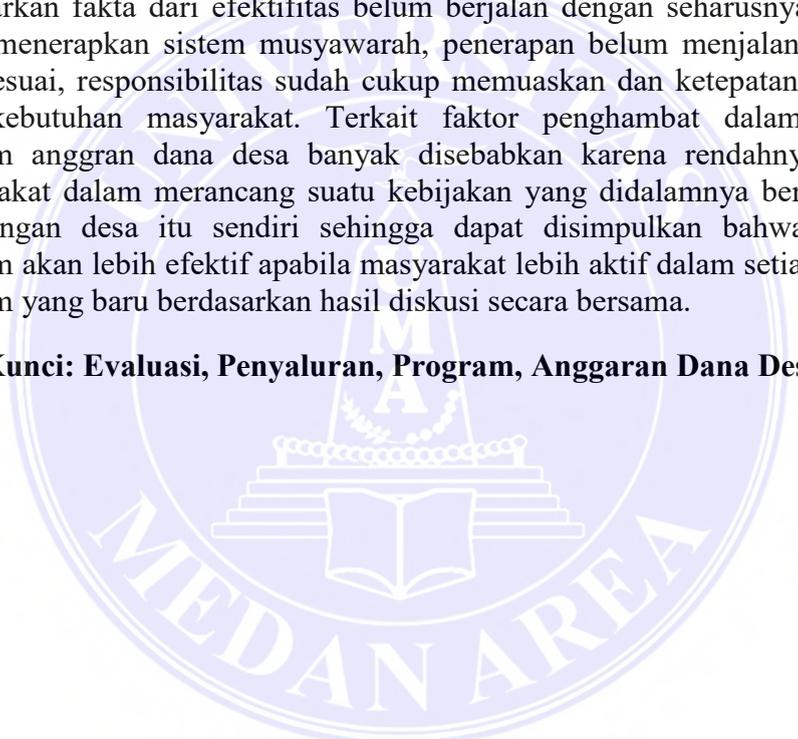
17.852.00.77



ABSTRAK

banyaknya masyarakat yang tidak puas dengan hasil program perangkat desa. Evaluasi penyaluran program akan menjadi bagian dari strategi dalam membuat suatu kebijakan menjadi lebih baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui evaluasi dan hambatan dalam penyaluran program anggaran dana desa di desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala desa, perwakilan perangkat desa dan perwakilan dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran program yang ada di desa Pamah masih belum sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal itu dapat di lihat berdasarkan fakta dari efektifitas belum berjalan dengan seharusnya, kecukupan sudah menerapkan sistem musyawarah, penerapan belum menjalankan program yang sesuai, responsibilitas sudah cukup memuaskan dan ketepatan sudah fokus pada kebutuhan masyarakat. Terkait faktor penghambat dalam penyaluran program angrgan dana desa banyak disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam merancang suatu kebijakan yang didalamnya bertujuan untuk kepentingan desa itu sendiri sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran program akan lebih efektif apabila masyarakat lebih aktif dalam setiap pembuatan program yang baru berdasarkan hasil diskusi secara bersama.

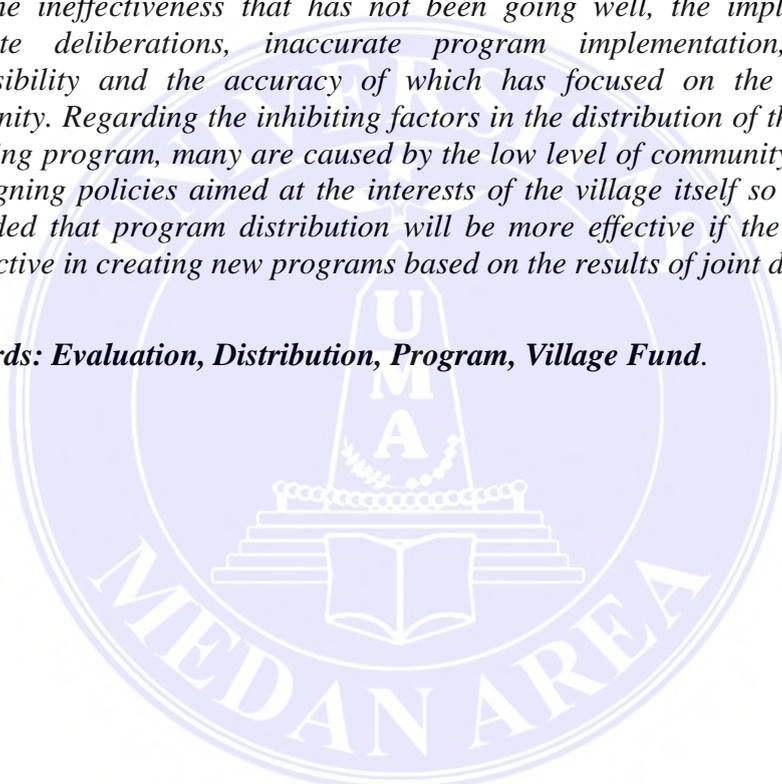
Kata Kunci: Evaluasi, Penyaluran, Program, Anggaran Dana Desa.



ABSTRACT

Most of the problems in the village are that there are still many programs that have not been implemented properly and some have. This can be seen from the number of people who are dissatisfied with the results of the village apparatus program. Evaluation of program distribution will be part of a better policy making strategy. The purpose of this study was to determine the evaluation and constraints in the distribution of the village fund program in Pamah Village, Tanah Pinem District, Dairi Regency. The research method used is descriptive qualitative method. The data sources in this study were the village head, village officials and community representatives. The results showed that the distribution of existing programs in Pamah Village was still not as planned. This can be seen from the ineffectiveness that has not been going well, the implementation of adequate deliberations, inaccurate program implementation, satisfactory responsibility and the accuracy of which has focused on the needs of the community. Regarding the inhibiting factors in the distribution of the village fund budgeting program, many are caused by the low level of community participation in designing policies aimed at the interests of the village itself so that it can be concluded that program distribution will be more effective if the community is more active in creating new programs based on the results of joint discussions.

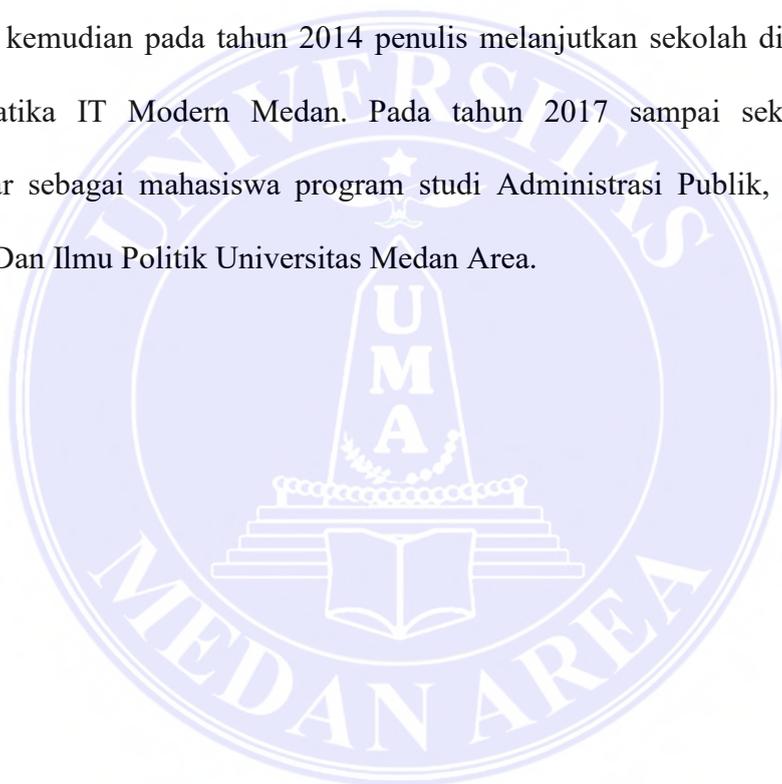
Keywords: *Evaluation, Distribution, Program, Village Fund.*



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sindi Dea Agustina Ginting, anak dari Mengat Ginting dan Beloh Min Sitepu. Lahir di Lau.Gunung pada 09 Agustus 1999. Penulis merupakan anak Tunggal.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar 030442 Pamah pada tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2011 penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Tanah Pinem, kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan sekolah di SMK Tritech Informatika IT Modern Medan. Pada tahun 2017 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah “ **Evaluasi Penyaluran Program Anggaran Dana Desa Di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi** ”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng. M. Sc selaku Rektor di Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto. MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Nina Angelia. S.Sos. M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si, selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Beby Masitho Batubara S.Sos, M.AP, selaku dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Imanuddin Kandias, S.Sos, M.AP, selaku Sekretaris dalam ujian sidang skripsi ini.

7. Seluruh dosen program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya atas motivasi, nasehat, doa yang tiada henti serta dukungan baik materi maupun moril
10. Abangda Anwar Soleh Purba yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
11. Sahabat saya yang selalu mensupport dan telah berjuang bersama hingga titik ini yaitu, Novi Irmayani, Riska Nadila, Khaikal Mustafa, Triswadi Silaban, Widia Aidina, Fahrizai, Fauzhan Azhima, Andy, Amel, Airin, Ryan.
12. Teman-teman mahasiswa Administrasi Publik stambuk 2017, yang selalu memberikan dukungan serta doa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, 26 Maret 2021

Penulis

Sindi Dea Agustina Ginting

17.852.0077

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1.Landasan Teori.....	7
2.1.1.Teori Evaluasi Program.....	7
2.1.2.Tujuan Evaluasi Program.....	10
2.1.3. Manfaat Evaluasi Program.....	11
2.1.4. Konsep Alokasi Dana Desa.....	13
2.1.5. Sistem Anggaran Desa	14
2.1.6. Sumber Pendapatan Desa	16
2.1.8. Kerangka Pemikiran.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1.Jenis Penelitian.....	25
3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian	26

3.3. Informan Penelitian	27
3.4. Teknik Pengumpulan Data	28
3.5. Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Hasil Penelitian	35
4.1.1. Deskripsi objek Penelitian	35
4.1.2. Visi dan Misi Desa Pamah	44
4.1.3. Struktur Pemerintahan Desa Pamah	46
4.1.4. Deskripsi Tugas Dan Wewenang Aparatur Desa	46
4.2. Pembahasan	53
4.2.1. Evaluasi Penyaluran Program Anggaran Dana Desa Kepada Masyarakat Di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi	53
4.2.2. Faktor Penghambat Pada Penyaluran Program Anggaran Dana Desa Di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80
Lampiran 1: Dokumentasi	
Lampiran 2: Data Informan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat luas dan terdiri dari beberapa Provinsi. Setiap provinsi di bagi-bagi menjadi beberapa tingkatan wilayah yaitu Kabupaten yang juga terbagi menjadi Kecamatan, di mana Kecamatan juga di bagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu desa dan kelurahan (Niswatin & Sirajudin, 2016, 171- 188). Dalam rencana meningkatkan pembangunan di Desa, Pemerintah telah membuat program pemberdayaan Desa. Dengan program pemberdayaan, diharapkan perangkat Desa bersama masyarakatnya dapat secara mandiri bekerjasama untuk memajukan dan membangun Desa tempat mereka tinggal yang di bawah pengawasan Pemerintah Kabupaten (Aldera, 2014: 50).

Sama halnya dengan Kabupaten Dairi yang terdiri dari berbagai kecamatan-kecamatan yang diantaranya ialah kecamatan Tanah Pinem. Kecamatan Tanah Pinem menjadi salah satu diantara 15 Kecamatan di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara. Wilayah ini terdiri dari 19 Desa dengan luas wilayah 439,40 km². Fokus penelitian ini hanya pada desa Pamah yang terkenal dengan program-program penyaluran anggaran dana desanya. Namun, program penyaluran anggaran dana desanya sering mendapatkan kendala-kendala yang tidak seharusnya terjadi. Sehingga diperlukan tindakan evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem tersebut.

Upaya desa Pamah dalam menyejahterakan warganya kebanyakan hanya melalui program pembangunan infrastruktur, sehingga program-program yang lainnya tidak tersentuh dengan baik. Padahal mereka sudah memiliki hak dalam mengatur desanya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Terlebih desa sudah memiliki pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh (Musmini & Sirajudin, 2016: 35). Desa Pamah merupakan bagian structural terkecil dari Pemerintah Kabupaten Dairi yang ada di Provinsi Sumatra Utara. Sehingga struktur pemerintahan desa Pamah Mempunyai Wewenang dalam Merencanakan Pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih pengurus Desa memiliki unsur yang paling dekat serta paling mengetahui segala kebutuhan masyarakat (Thomas, 2013: 51-64).

Desa Pamah merupakan salah satu daerah yang menerima anggaran Dana Desa yang selanjutnya akan disalurkan ke warganya melalui program yang sudah ditetapkan. Diantaranya program pembangunan pembukaan jalan menuju dusun dari desa, program pembangunan pengerasan jalan, program pembangunan rabat beton dan masih ada beberapa program lainnya. Tentu semua itu bagian dari rancangan desa sesuai dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Karena anggaran dana desa sudah semestinya dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara keberlanjutan.

Terlaksananya program tersebut terlihat tidak begitu berjalan dengan baik. Sehingga sudah menjadi kewajaran apabila beberapa masyarakat tidak puas dengan program tersebut. Maka dari itu, diperlukan tindakan evaluasi. Tindakan

evaluasi ini akan memperbaiki sistem yang sudah berjalan, sebagaimana kewenangan desa dalam mengatur wilayahnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu Penyaluran Program Anggaran Dana Desa di Desa Pamah belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan beberapa program yang tidak terealisasi, Maka dari itu dilakukan lah evaluasi dari kekurangan dalam penyaluran program tersebut, hasil dari evaluasi yang dilakukan di Desa Pamah yaitu dilakukannya musyawarah suatu kebijakan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan di setiap dusun yang berbeda. Jadi Perangkat desa dan masyarakat memutuskan untuk mengimplementasikan kebutuhan dusun yang memiliki tingkat skala prioritas.

Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat. Pembangunan Desa harus dilaksanakan dengan persiapan yang terencana dengan baik dan dapat di pertanggungjawabkan (Rizaldi, 2012: 404-423). Hal serupa juga telah dilaksanakan di Desa Pamah dengan tujuan untuk menerapkan rancangan pembangunan Desa. Sehingga pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa, khususnya desa Pamah dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembangunan Desa itu sendiri (Grabowski, 2011: 241-253).

Oleh karena itu, Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dairi harus berfungsi dengan semestinya dalam pengalokasian dana dari APBN. Sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan anggaran dana Desa terkhususnya di Desa Pamah. Maka dari itu, harus dilakukan pemantauan serta evaluasi terhadap

berbagai Program-Program baik dari penyaluran Anggaran dari APBN ke Desa Pamah maupun dari Badan Permusyawaratan Daerah itu sendiri. Sebagaimana menurut Soemalis dalam Mardikanto (2015:265) bahwa dengan adanya Evaluasi maka proses pengambilan keputusan Penyaluran Program anggaran dana Desa akan dapat sesuai dengan standart Evaluasi Objek yang akan dicapai.

Adapun standart evaluasi object yang dicapai antaranya anggaran dana desa yang di tetapkan tidak sesuai dengan program-program yang telah dibuat oleh perangkat desa sehingga terdapat suatu ketimpangan antara dana yang telah direncanakan dengan apa yang telah terealisasi di lapangan, maka dari itu perlu peninjauan terkait standart pembangunan desa yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dengan pemerintah Desa Pamah.

Hasil Penelitian terkait Evaluasi Penyaluran Program di desa Pamah Peneliti menemukan bahwa terdapat suatu ketimpangan-ketimpangan terkait kebijakan yang dibuat oleh perangkat desa sehingga masyarakat dengan perangkat desa membutuhkan suatu evaluasi demi kepentingan masyarakat secara umum. Masalah ini dapat dilihat dari beberapa kasus berupa pembangunan infrastruktur dan bantuan-bantuan sosial.

Hal inilah yang menjadi dasar peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul, evaluasi penyaluran program anggaran dana desa di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah pada penelitian mengenai “Evaluasi Penyaluran Program

Anggaran Dana Desa Di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi”

Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah evaluasi penyaluran program anggaran dana desa kepada masyarakat di desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi?
2. Apakah faktor penghambat pada evaluasi penyaluran program anggaran dana desa di desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi?

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari Penelitian ini antara lain sebagai berikut:

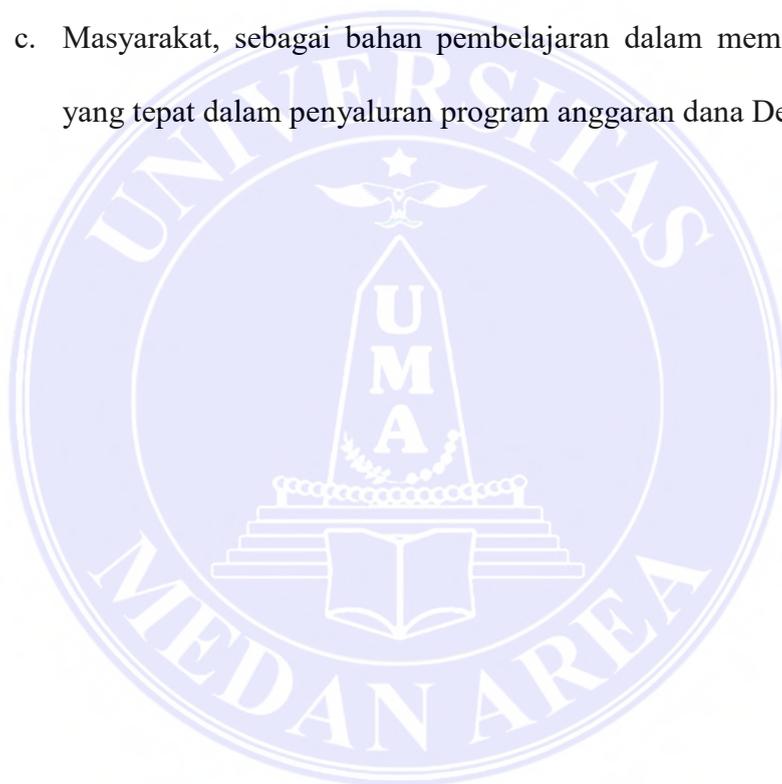
1. Untuk mengetahui evaluasi penyaluran program anggaran dana Desa kepada masyarakat di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pada evaluasi penyaluran program anggaran dana Desa di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi?

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis antara lain:
 - a. Dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya
 - b. Dapat memperluas wawasan tentang sistem informasi khususnya mengenai evaluasi penyaluran anggaran dana Desa
2. Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan dan pertimbangan bagi :

- a. Peneliti, sebagai sarana dalam menambah ilmu pengetahuan serta untuk menambah pemahaman akan keilmuan administrasi publik sehingga penelitian tersebut akan mampu menjadi metode dalam memahami permasalahan tentang anggaran dana Desa.
- b. Program Studi Ilmu Administrasi Publik, sebagai media informasi dan menambah ilmu pengetahuan khususnya kajian evaluasi program dana Desa
- c. Masyarakat, sebagai bahan pembelajaran dalam memahami strategi yang tepat dalam penyaluran program anggaran dana Desa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Evaluasi Program

Pengertian evaluasi tentu beragam sesuai dengan objeknya masing-masing. Sehingga banyak ahli yang mendefinisikan sesuai dengan ruang lingkungannya. Mulai dari perbedaan filosofi dan ideologi, b) latar belakang pilihan dan metodologi, c) perbedaan perumpamaan mengenai evaluasi, d) menjawab kebutuhan yang berbeda, dan e) pertimbangan mudah dilaksanakan (Worthen, 2004). Evaluasi menjadi proses pengumpulan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan evaluasinya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2006 : 12).

Evaluasi meliputi pokok-pokok dalam metode penelitian sosial untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Sehingga informasi tersebut dapat membantu dalam pembentukan kebijakan publik, rancangan program, dan penilaian efektifitas dan efisiensi kebijakan-kebijakan sosial dan program-program social (Alkin, 2004). Selain itu, Soemalis dalam Mardikanto (2016: 265) juga menjelaskan evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap sesuatu obyek. Begitu juga dengan pernyataan Siagian dalam Mulyadi (2016: 122) yang mendefinisikan evaluasi adalah sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Jenis evaluasi berdasarkan waktu dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Evaluasi *ex-ante* adalah penilaian terhadap kemungkinan pengaruh yang terjadi di masa depan.
2. Evaluasi *midterm* adalah tipe dari evaluasi formatif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pada saat fase implementasi dari program atau kegiatan.
3. Evaluasi *final or terminal* merupakan tipe dari evaluasi sumatif karena dilakukan menjelang akhir dari fase pelaksanaan kegiatan atau program.
4. Evaluasi *ex-post*, yaitu evaluasi yang dilakukan ketika program atau kegiatan telah selesai dilakukan, bahkan biasanya dilakukan setelah 2 tahun atau lebih program kegiatan tersebut selesai.

Begitu juga dengan program yang menjelaskan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk di operasionalkan dan tentu sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Menurut Dunn (2000: 30) bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian. Fungsi evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya terhadap kinerja program atau kebijakan untuk mengungkap seberapa jauh tujuan dan target yang telah dicapai. Adapun indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2000:30) antara lain: 1) Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, 2) Kecukupan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat

memecahkan masalah, 3) Pemerataan, apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berbeda secara merata, 4) Responsibilitas, apakah hasil dari kebijakan mengandung preferensi/nilai dapat memuaskan mereka, dan 5) Ketetapan, yaitu apakah pencapaian hasil dapat bermanfaat.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa indikator atau kriteria yang akan diamati dalam penelitian ini ialah mengenai Evaluasi penyaluran program anggaran dana desa di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Beberapa hal penting mengenai indikator yang akan diamati tersebut akan peneliti nilai menggunakan teori model evaluasi menurut William N.Dunn.

1. Efektivitas yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
2. Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
3. Perataan yaitu berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi kepada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.
4. Responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat

tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah dimulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

5. Ketepatan yaitu dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dalam Suharsimi dan Jabar (2009:5) bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Sesuai beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data yang ada atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan. Hal ini akan menjadi dasar dalam menjawab permasalahan terkait evaluasi penyaluran program anggaran dana desa di Pamah. Peneliti akan memaparkan dasar teori evaluasi sebagai kerangka dalam mengungkapkan masalah.

2.1.2 Tujuan Evaluasi Program

Tujuan Evaluasi Program yaitu menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi (Mulyatiningsih, 2011: 114-115). Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu. Maka, evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif.

Terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program. Kalau untuk penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya di deskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program. Apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya. Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

2.1.3 Manfaat Evaluasi Program

Evaluasi program dapat di artikan dengan kegiatan supervisi. Secara singkat, supervisi diartikan sebagai upaya mengadakan peninjauan untuk memberikan pembinaan. Maka, evaluasi program adalah langkah awal dalam

supervisi yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Jika supervisi di lembaga pemerintahan desa dilaksanakan, maka evaluasi program dilakukan dengan objek secara keseluruhan. Kebijakan supervisi yang berlangsung saat ini dapat dikatakan sama dengan evaluasi program. Berdasarkan paparan tersebut, supervisi yang diartikan sebagai evaluasi program dapat disamaartikan dengan validasi lembaga. Evaluasi program merupakan langkah awal dari proses akreditasi dan validasi lembaga.

Kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program. Karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tidak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan (*decision maker*). Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan, yaitu

1. *Menghentikan program*, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
2. *Merevisi program*, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
3. *Melanjutkan program*, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
4. *Menyebarkan program*, karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

2.1.4 Konsep Alokasi Dana Desa

Konsep Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana Alokasi khusus Desa yang di alokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Alokasi Dana Desa berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Peraturan Peraturan No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11). Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD kabupaten/kota. Komponen Alokasi Dana Desa di alokasikan sekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10 persen dari pajak dan retribusi. Adapun tujuan dari alokasi dana Desa ini adalah (Nurcholis, 2011: 89) :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Sunarjo dalam Suprihatini (2007: 3) menjelaskan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu. Memiliki ikatan yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena samasama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Selain itu, desa memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Suprihatini, 2007:18).

Pemerintahan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI yang disebut lembaga kemasyarakatan desa. Keuangan yang dimiliki desa digunakan dan dimanfaatkan untuk anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan (Suprihatini, 2007: 39-42).

2.1.5 Sistem Anggaran Desa

Sistem anggaran desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber

dari APBN, dengan lingkup kewenangan desa dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa. Maka, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dana desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di Desa. Masalah dana desa di Indonesia kerap muncul mulai dari kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa, Sumber daya manusia yang belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, regulasi dana desa, transparansi yang kurang, dan kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Permasalahan yang ada harus segera di carikan solusinya agar ditahun anggaran berikutnya tidak ada masalah yang menjadi temuan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap desa. Pentingnya koordinasi di berbagai lini agar dana desa yang sudah cair dapat berjalan secara optimal. Para aparatur desa harus mengajak masyarakat untuk ikut serta terhadap pembangunan untuk kemajuan desa sehingga pembangunan akan merata, oknum desa mempunyai integritas baik, jujur dan bertanggungjawab terhadap anggaran dana desa.

Melalui landasan konsep inilah diharapkan anggaran dana desa dapat terorganisir dengan baik. Terlebih yang terdapat di desa Pamah kecamatan taneh Pinem. Desa ini sudah mengalokasikan beberapa anggaran dana desa terhadap program-program yang telah di tetapkan. Namun, beberapa program tersebut

belum sesuai dengan semestinya. Sehingga terdapat ketidakpuasan oleh masyarakat setempat.

2.1.6 Sumber Pendapatan Desa

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa di danai dari APBD desa, bantuan pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di danai APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai APBN (Nurcholis, 2011:81). Sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten.
4. Bantuan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang bersumber dari APBN dan APBD melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, dan lain-lain.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Disamping itu, keuangan desa harus di bukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu mulai 1 januari sampai 31 desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBD desa. Dalam APBD desa inilah terlibat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBD desa melalui kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warganya dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya, sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Karena tanpa APBD Desa, pemerintahan desa tidak dapat melaksanakan program kegiatan publik. Adapun anggaran belanja dan pendapatan desa terdiri atas:

a. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

kembali oleh desa, pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, hibah, serta sumbangan pihak ketiga (Nurcholis, 2011:83).

b. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga.

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, penerimaan pinjaman;
2. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa dan pembayaran utang.

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, khusus

bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa yang wajib dicatat dalam APBD desa, setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan pengaturan desa tentang APBD desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

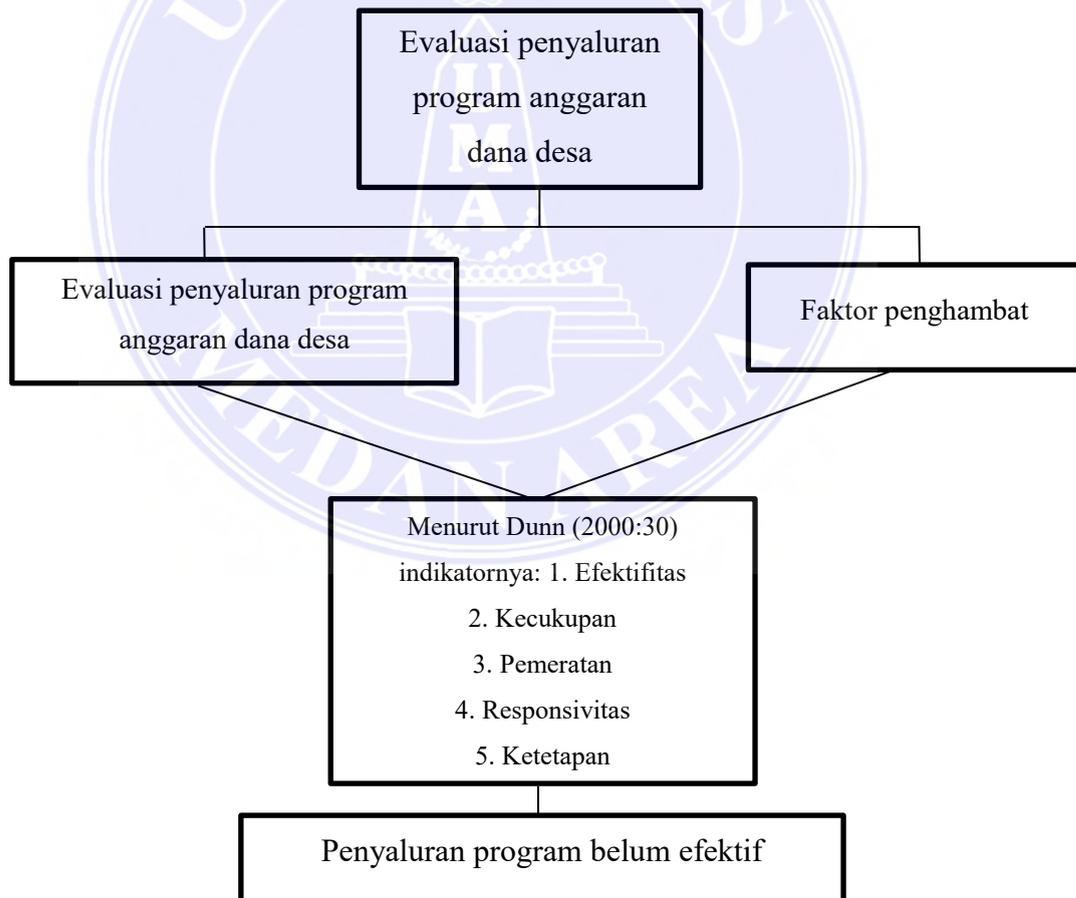
2.1.8 Kerangka pemikiran

Menurut Plano (2010 : 266) kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam ilmu pengetahuan empiris (ilmu politik dan ilmu pemerintahan), teori mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel dengan maksud dengan menjelaskan kedua-duanya.

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian.

Adapun penelitian terkait tentang evaluasi penyaluran program anggaran dana di Desa Pamah bahwa terdapat suatu masalah yang harus diluruskan karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan berdasarkan kebutuhan penduduk sehingga untuk melihat masalah tersebut peneliti menggunakan pisau analisis teori William N.Dunn tentang teori evaluasi berdasarkan beberapa indikator. Melalui teori ini peneliti telah menemukan apa yang harus dievaluasi dalam penyaluran program anggaran dana desa dan peneliti juga telah mengungkapkan apa yang menjadi faktor penghambat dalam evaluasi penyaluran program anggaran dana desa.

Analisis tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Bagan 1

Kerangka Pikir

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan peneliti kutip dari penelitian Ali Ulumudin yang berjudul “Evaluasi pengelolaan dana desa di desa puser kecamatan tirtayasa kabupaten serang tahun 2016” disimpulkan bahwa belum tercapainya tujuan umum dana desa yang telah ditetapkan. Efektifitas program dari anggaran dana desa pada tahun 2016 di Desa Puser sudah dilaksanakan yaitu pembangunan di Rw. 01 tepatnya di Rt. 02 dan di Rw. 03 tepatnya di Rt. 03,04 dan 05. Dalam pelaksanaan pembangunannya sudah berjalan dengan baik, namun dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Puser masih kurangnya partisipasi masyarakat serta koordinasi yang belum berjalan dengan baik.

Masih kurangnya pemahaman aparat desa dan pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa, kemudian dalam pengumpulan dan penyusunan dokumen-dokumen sudah tertata dengan baik. Respon masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Puser tahun 2016 kurang mengetahui dan belum transparan terhadap anggaran maupun laporan pertanggungjawabannya

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu hanya fokus pada pengelolaan dana dan respon masyarakat sementara penelitian ini meneliti tentang bagaimana penyaluran anggaran dana Desa serta mengevaluasi kekurangan dari program anggaran dana Desa

Penelitian relevan yang selanjutnya peneliti kutip dari penelitian Gagarin Putra dan Pratiwi Dwi Karijati yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk” Pada penelitian ini

menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah mengalami pencapaian sesuai target yang diharapkan. Efisiensi ditinjau dari usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa memenuhi secara kuantitas, namun dari segi kualitas masih diperlukan pembinaan untuk pengelolaan dana desa. Kecukupan ditinjau melalui kemampuan dana desa yang disalurkan dalam membantu permasalahan perekonomian. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kebijakan dari penyaluran dana desa sejauh ini belum optimal membantu permasalahan ekonomi di Desa Putren, karena lebih cenderung memenuhi pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan pemavingan dan gorong-gorong. Perataan ditinjau melalui bagaimana dana desa di distribusikan secara adil dan merata sesuai dengan penganggaran yang disesuaikan peraturan pemerintah.

Penelitian tersebut hanya fokus pada pengelolaan pembangunan infrastruktur sementara penelitian ini meneliti tentang bagaimana penyaluran anggaran dana Desa serta mengevaluasi kekurangan dari program anggaran dana Desa

Penelitian relevan ketiga penulis menutip dari penelitian Victor P. K. Lengkong, Hizkia H. D. Tasik yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (Dp2d2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “ Disimpulkan bahwa Dana Desa cenderung difokuskan untuk pendanaan pembangunan Sarpras Transportasi seperti jalan desa. Dari 15 desa yang masuk dalam sampel, semuanya tercatat melaksanakan pembiayaan untuk sarpras jenis ini. Alokasi dana untuk sarpras jenis ini sangat besar, karena biaya yang tinggi untuk pembuatan ataupun perbaikan jalan. Pembangunan Sarpras Ekonomi hanya tercatat dilakukan oleh 2

desa. Permasalahan yang ditemui untuk pembangunan sarpras jenis ini adalah beberapa desa yang ada di satu wilayah yang berdekatan cenderung hanya memiliki 1 pasar. Adapun pengadaan dana untuk program jenis ini cenderung untuk mengembangkan pasar yang sudah ada. Pembangunan Sarpras Ketahanan Pangan didanai desa-desa yang bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan.

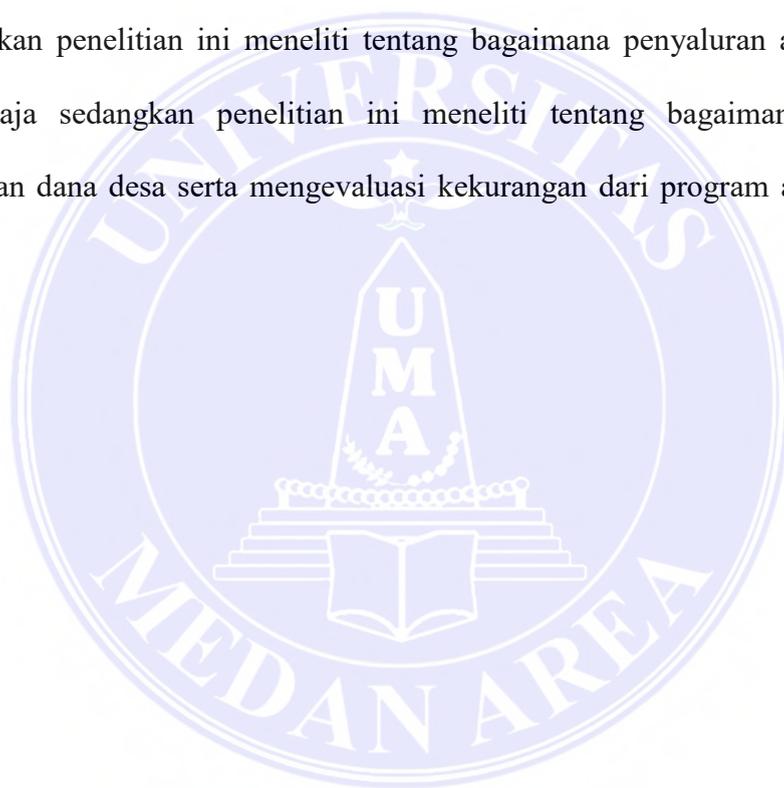
Pada penelitian relevan ini peneliti cenderung memfokuskan untuk pendanaan pembangunan Sarpras Transportasi seperti jalan desa sementara penelitian ini meneliti tentang bagaimana penyaluran anggaran dana Desa serta mengevaluasi kekurangan dari program anggaran dana Desa.

Penelitian terakhir yang penulis kutip dari penelitian Siti Aljannah yang berjudul “Evaluasi alokasi dana desa (add) dalam menunjang pembangunan desa di kecamatan Tambusai utara kabupaten Rokan Hulu “ Adapun ditemukan kesimpulan dalam penelitian ini antara lain : Evaluasi Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan Desa di Desa Tambusai Utara tahun Anggaran 2013-2014 telah terlaksana, akan tetapi dalam pengalokasian dana ADD belum sesuai. Penggunaan Alokasi Dana Desa Tambusai Utara lebih banyak digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar 45% atau sebanyak Rp. 167.800.000, kemudian dana untuk operasional desa sebesar Rp. 43.680.000 atau sekitar 12% dari jumlah ADD yang telah ditentukan menurut Perda Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa seperti bantuan sosial, bantuan keuangan kemasyarakatan desa cukup besar yaitu Rp. 144.884.000 atau sekitar 38%. Untuk pembangunan Infrastruktur desa pengalokasian dananya sangat sedikit hanya Rp.19.436.000 atau sekitar 5%.

Penggunaan ADD oleh pemerintah desa Tambusai Utara tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa menurut UU No. 22 Tahun 2005 tentang tujuan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Bimbingan pemerintah kecamatan dan Kabupaten masih lemah sehingga pemberdayaan desa belum maksimal, dan Pemerintah desa Tambusai Utara dalam mengelola keuangan desa masih kurang transparan, akuntabel, partisipatif.

Penelitian terdahulu tersebut terlalu fokus kepada pembangunan desa saja sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana penyaluran anggaran dana desa saja sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana penyaluran anggaran dana desa serta mengevaluasi kekurangan dari program anggaran dana desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Metode Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Seperti halnya penelitian kualitatif memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati (Moleong, 2012: 4). Pada tahap pengumpulan data, peneliti juga berusaha menguraikan beberapa temuan yang dilandasi dari suatu teori. Karena dalam penelitian kualitatif harus di uraikan secara komparatif untuk memberikan landasan teori dan aplikasi di lakukan dengan lima pendekatan yang salah satunya yaitu pendekatan fenomenologi (Craswell, 2014). Dalam proses pengumpulan data, peneliti memahami kondisi lapangan yang berhubungan dengan Evaluasi Program Penyaluran Anggaran Dana Desa. Memahami yang dimaksud bukan sekadar paham, tetapi lebih dalam lagi yaitu memahami hingga inti fenomena yang diteliti, sehingga memahami atau *understanding* menjadi tujuan dari penelitian kualitatif (Herdiansyah, 2012).

Peneliti berperan langsung dengan menempatkan diri sebagai pengamat di lokasi dan juga berperan langsung dalam wawancara dengan Perangkat Desa dan Masyarakat setempat. Peneliti langsung melihat bagaimana berjalannya Sistem Program Anggaran Dana Desa. Dengan melihat secara langsung, maka peneliti menggali data terkait tujuan penelitian tersebut.

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah, metode penelitian digunakan ketika melakukan penelitian pada saat penyusunan skripsi dan penelitian ilmiah lainnya. Menurut Sugiyono (2015:1) mengemukakan penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Mulyatiningsih (2011:1) penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi Pada penelitian ini, yaitu di Desa Pamah Kec.Tanah Pinem Kab. Dairi. Lokasi penelitian ini dianggap sangat layak untuk meneliti terkait evaluasi program anggaran desa. Maka diketahui kelayakan sistem penganggaran desa dan evaluasi dari proses penganggaran tersebut.

2.2.2 Waktu Penelitian

Penyusunan skripsi ini penulis melaksanakan penelitian secara bertahap hingga selesai penelitian. Adapun tahapan perincian kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan yang tertera tabel berikut ini :

Tabel 1
Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Sept 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021
1	Penyusunan proposal										
2	Seminar proposal										
3	Perbaikan proposal										
4	Pengambilan Data/Penelitian										
5	Penyusunan skripsi										
6	Seminar hasil										
7	Perbaikan Skripsi										
8	Sidang meja hijau										

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain

atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.

Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Informan Kunci. Menurut Afrizal (2016:139) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa yaitu Bapak Daniel Wilser A.I Sagala
- b. Informan Utama. Menurut Afrizal (2016:139) Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini Perangkat Desa yaitu Bapak Andhy Soesanto Pinem dan Bapak Martinus Tarigan
- c. Informan Tambahan. Menurut Afrizal (2016:139) Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini Masyarakat setempat yaitu Bapak Imanuel Tarigan dan Ibu Ani

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi data.

3.4.1 Observasi

Observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subjek secara aktif mereaksi terhadap objek. Karena observasi merupakan bagian teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung

ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004:104). Adapun kelebihan metode observasi salah satunya adalah data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan yang tinggi karena peneliti mengamati secara seksama setiap detail perilaku yang batasannya telah ditentukan sebelumnya (Herdiansyah, 2009). Adapun yang menjadi fokus observasi peneliti yaitu memperhatikan bagaimana penyaluran anggaran dana desa, bagaimana mengevaluasi dan apa kekurangan dari program tersebut.

3.4.2 Wawancara

Wawancara dilakukan terutama karena ada anggapan bahwa hanya informanlah yang paling tahu tentang diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain, akan diperoleh dengan wawancara (Rianto, 2004). Untuk memperoleh suatu data yang akurat peneliti menggunakan metode wawancara langsung dengan informan yang hendak diteliti. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih akurat bagaimana Sistem Evaluasi Program Penyaluran Anggaran Dana Desa di Desa Pamah . Selama wawancara, pewawancara dengan informan terlibat dalam proses interaksi relatif lama, sehingga ini bermanfaat bagi pewawancara (Bungin, 2007).

Melalui wawancara semi terstruktur dalam penelitian adalah salah satu cara dalam penelitian ini, dikarenakan sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* sehingga peneliti nantinya akan mendapatkan suatu data yang akurat dan sesuai dengan fakta dari informan tersebut. Untuk penelitian ini informan sangatlah dibutuhkan agar tercapainya suatu kesempurnaan dalam penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti fokus untuk mengetahui bagaimana penyaluran anggaran dana desa, bagaimana mengevaluasi dan apa kekurangan dari program tersebut.

3.4.3 Dokumentasi

Melalui studi dokumentasi dalam penelitian. Maka salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Ini dilakukan guna mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya (Herdiansyah, 2009).

Adapun faktor lain dalam mendukung penelitian ini yaitu, peneliti menggunakan beberapa alat dokumentasi seperti kamera dan alat-alat perekam lainnya. Peneliti akan fokus mendokumentasikan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat, memfoto lokasi riset. Studi dokumentasi dalam penelitian juga akan di perkuat dari buku-buku, jurnal, dan berbagai situs internet yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dokumentasi dari penelitian yang dilakukan ialah Data-Data terkait dengan Program desa, Anggaran dana desa, Data infoman, dan Foto-foto dengan informan.

Melalui tahap dokumentasi, peneliti akan mengumpulkan data terkait dengan evaluasi penyaluran program anggaran dana desa, baik dari dokumen-dokumen perangkat desa, hasil wawancara tentang anggaran dana desa, dan melihat hal-hal yang sudah terlaksana dilapangan sesuai dengan anggaran dana desa tersebut.

3.4.4 Triangulasi data

Trianggulasi data adalah teknik pemeriksaan atau menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. (Sugiyono, 2007: 372) mengemukakan bahwa triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahaan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Trianggulasi menurut (Denzin dalam Tohirin, 2011:73-74) membedakan empat macam triangulasi yaitu :

1. Trianggulasi sumber, caranya antara lain : (1) membandingkan data hasil dengan data hasil wawancara. (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa dikatakan secara pribadi. (3) membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah, menengah, dan tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan. (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Trianggulasi dengan metode. Caranya adalah : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Trianggulasi dengan penelitian. Caranya adalah dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat

kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan membandingkan hasil pekerjaan seseorang analisis seseorang analisis lainnya dalam konteks yang berkenaan.

4. Triangulasi dengan teori, makna lainnya adalah dengan penjelasan banding (*rival explanation*).

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:336) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model *Miles dan Huberman* (2012:255) meliputi :

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian lapangan, pada saat penulis melakukan penelitian tentang evaluasi penyaluran program anggaran dana desa di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

3.5.2 Display Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan

tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami, yang penulis lakukan dalam penelitian tentang evaluasi penyaluran program anggaran dana desa di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

3.5.3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan yaitu bagaimana evaluasi penyaluran program anggaran dana desa dan faktor penghambat dalam penyaluran program anggaran dana desa di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.maka dilakukan kesimpulan data atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Berhubungan dengan pemaparan teknik analisis data di atas. Maka hal tersebut sejalan dengan penjelasan Sugiyono (2008) yang menyatakan analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Teknik analisis data merupakan upaya mencari data dan

menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara mendalam dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Data tersebut sangat dideskripsikan, sehingga memberikan kejelasan sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Proses analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analitik.

Adapun dari ketiga proses pengumpulan data yang dijelaskan yakni reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dimulai sejak pengumpulan data di lapangan. Melalui langkah-langkah yang dipaparkan di atas dapat membantu pengumpulan kekurangan data. Sehingga dalam penelitian ini telah dilakukan beberapa kali perbaikan sampai akhirnya menghasilkan sebuah Karya Ilmiah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan cermat dari kesimpulan awal sampai kesimpulan akhir, hingga ditemukan validitas data yang valid.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait Evaluasi Penyaluran Program Anggaran Dana Desa Di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi Penyaluran Program Anggaran Dana Desa Di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Program yang ada di Desa belum cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari program BLT-DD yang masih perlu dievaluasi karena penerima bantuan tersebut belum tersalurkan secara merata. Selain itu terdapat masalah lain berupa program pembangunan rabat beton yang dimana anggarannya tidak difungsikan secara semestinya. Terkait dengan Kecukupan dari Program Desa bahwa sudah diterapkannya suatu musyawarah terkait penyaluran anggaran dana desa yang bertujuan untuk membuat jumlah anggaran tersebut tepat sasaran. Begitu juga dengan Penerapan Program, perangkat desa kurang efektif dalam merancang anggaran. Hal itu dapat terlihat dari ketidakmerataan anggaran yang ditetapkan terhadap 6 dusun. Sehingga akan menimbulkan kecemburuan social bagi masyarakat setiap dusun. Terkait dengan responsibilitas perangkat desa dan masyarakat, sudah terdapat kepuasan yang dimana masyarakat sudah merasakan hasil evaluasi program berupa penyediaan infrastruktur jalan ke kebun, jalan ditengah dusun dan bantuan social

lainnya. adapun sedikit kritikan terhadap perangkat desa bahwa masih terdapat bantuan social yang tidak diterima oleh orang yang semestinya. Adapun yang terkait dengan ketepatan bahwa semua hasil dan kebijakan yang dibuat oleh perangkat desa ada yang diterima baik oleh masyarakat dan ada yang tidak. Hal yang baik itu dapat dilihat dari beberapa fasilitas yang menunjang aktifitas mereka terkait dengan hal yang tidak sesuai menurut masyarakat, maka akan dilakukan suatu evaluasi yang dimana akan dimusyawarahkan oleh perangkat desa dan masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

2. Faktor penghambat terkait evaluasi penyaluran program anggaran dana desa diantaranya disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberi masukan terhadap perangkat desa. Hal itu dapat dilihat dari masih rendahnya angka ketidakhadiran penduduk saat merancang apa yang menjadi kebutuhan masing masing dusun di dalam rapat perangkat desa. Selain itu faktor penghambat penyaluran program anggaran dana disebabkan karena banyaknya jumlah dusun yang ada di desa pamah sehingga proses pemerataan infrastruktur dan bantuan-bantuan sosial membuat perangkat desa menjadi kesulitan. Terlebih lagi jumlah annggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan masing-masing dusun.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait Evaluasi Penyaluran Program Anggaran Dana Desa Di Desa Pamah Kecamatan Tanah

Pinem Kabupaten Dairi dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun saran dalam penelitian ini Perangkat desa harus lebih sering memperhatikan setiap implementasi kebijakan agar masyarakat tidak merasa didiskriminalisasikan hak nya dalam setiap adanya program-program baru. Perangkat desa juga harus transparan dalam setiap merancang kegiatan yang berhubungan dengan keputusan berserta anggaran-anggaran yang telah ditetapkan secara semestinya, sehingga akan terdapat suatu integritas antara perangkat desa dengan masyarakat secara keseluruhan.
2. Perangkat desa harus lebih ekstra dalam mengajak masyarakat saat ingin membuat suatu program untuk setiap dusun nya. Kerana pada umumnya masyarakat desa itu memiliki sifat rasa ketidak ingintahuan yang tinggi sehingga perangkat desa harus memiliki strategi yang lebih bersifat adaptif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peningkatan kemajuan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Aldera, Antika, (2014). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Alokasi Dana Desa (Suatu Studi Di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak), hlm 50.
- Anselm, Strauss Dan Juliet Corbin. (2003). "Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif". Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cipi Safruddin Abdul, (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Pratisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan, (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika
- Bagong, Suyanto. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarata : Kencana Prenanda Media Group.
- Creswell, Jhon W (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches: Fourth Edition*. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- (2003). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Istifazhuddin, Alif Hazmi. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Add (Alokasi Dana Desa) Di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga)*.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga

- Istifazhuddin, Alif Hazmi. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Add (Alokasidana Desa) Di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Universitas Airlangga : Surabaya.
- Jody L. Fitzpatrick, James S. Sanders, dan Blaine R. Worthen, (2004). *Program Evaluation: Alternative Approach and Practical Guidelines*, New York: Pearson Education
- Mardikanto, dan Soebianto. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy (2016). Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Mulyatiningsih, E. (2011). Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. Yogyakarta: Alfabeta.
- Marvin C. Alkin (ed.), (2004). *Evaluation Roots: Tracing Theorists Views and Influences*, London: Sage Publications, 127.
- Nurcholis, Amin. (2011). Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ciracas, Jakarta: Erlangga.
- Noor, Isran, (2012), Bukupintar Penyuluh Pertanian, Jakarta: Perhaptani (Perhimpunan penyuluh Pertanian Indonesia).
- Riduwan. (2004). Metode Dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Salim, Agus, (2001). Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiarawacana.
- Suprihatini, Amin. (2007). Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. Karanganyar: Cempaka Putih, Edisi Pertama.
- Tohirin. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam bimbingan dan konseling. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. (2006). Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi. Jakarta.

Jurnal:

- Aswardi & Sukanto. (2014). Efektivitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1):29-41
- Dewi, & Setiawan, (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Persepsi Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17 (1):84-111.
- Grabowski, Richard. (2011). Indonesian Economic Development: Political Economy Of An Effective State. *Journal Of The Asia Pacific Economy*, 16(2): 241-253.
- Liliana & Inten Meutia. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2):336-337
- Musmini, Lucy Sri, Sirajudin, Sirajudin (2016). Makna Akuntansi Sosial Dan Sustainabilitas Sekaa Suka Duka. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2): 35
- Niswatin & Mahdalena. (2016). Nilai Kearifan Lokal “Subak” Sebagai Modal Sosial Transmigran Etnis Bali. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2):171-188.
- Nasution, I., & Sujianto, S. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional (Studi Pada Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Putra, Gagarin & Karjati, Pratiwi Dwi. (2019). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Economie*, 1(1): 62-74.
- Rizaldy, Novan. (2012). Menemukan Lokalitas Biological Assets: Pelibatan Etnografis Petani Apel. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(3): 404-423.
- Renandi, Vany maolina. (2018). Analisis Pasca Penyaluran Dana Desa (Studi Empiris Pada Nagari Vii Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota). *Jurnal Akuntansi*, 6(3): 5-7.
- Setiawan. Anggik Agus, Citra. Norita & Puspito. Ade, (2018). Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian Dan Pelaporan Dana Desa Sumber Salak Kec Ledokombo Kabupaten Jember. *International Journal Of Social Science And Business*, 2(4): 203-208.
- Saputra, I Wayan. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (Jjpe)*, 6 (2): 1-2.

Thomas, (2013). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung", *Ejurnal Pemerintahan Integratif*. 1(1):51-64.

Perundang-Undangan:

Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014, tentang Kewenangan yang dimiliki Desa.

Lampiran 1

DOKUMENTASI



Gambar 1

Dokumentasi dengan informan kunci Bapak Daniel Wilser A.I Sagala selaku Kepala Desa Di Kantor Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2021)



Gambar 2

Dokumentasi dengan informan utama Bapak Andhy Soesantho Pinem selaku Sekertaris di Kantor Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2021)



Gambar 3

Dokumentasi dengan informan utama yaitu Bapak Martinus Tarigan selaku Kepala seksi perencanaan dan pembangunan di kantor Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2021)



Gambar 4

Dokumentasi dengan informan tambahan yaitu Bapak Imanuel Tarigan selaku masyarakat di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.
(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2021)



Gambar 5

Dokumentasi Lokasi Penelitian di Kantor Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2021)

Lampiran 2

Data Informan

1. Informan Kunci

Nama : Daniel Wilser A.I Sagala
Usia : 41 Tahun
Alamat : Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi
Jabatan : Kepala Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi

2. Informan Utama

Nama : Andhy Soesanto Pinem
Usia : 44 Tahun
Alamat : Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi
Jabatan :Sekertaris Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi

Informan Utama

Nama : Martinus Tarigan
Usia : 41 Tahun
Alamat : Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi

3. Informan Tambahan

Nama : Imanuel Tarigan
Usia : 35 Tahun
Alamat :Dusun Lau.Gunung Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi
Pekerjaan : Wirausaha

4. Informan Tambahan

Nama : Ani
Usia : 41 Tahun
Alamat : Dusun Lau.Pentundal Desa Pamah Kecamatan Tanah
Pinem Kabupaten Dairi
Pekerjaan : Petani